

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan suatu proses transfer ilmu yang melibatkan pendidik dan peserta didik, peserta didik tidak hanya mengembangkan potensi intelektualnya saja namun lebih menekankan kepada nilai-nilai kepribadian yang nantinya nilai itu akan dibawa ke dalam lingkungan masyarakat sehingga peserta didik menjadi lebih dewasa dan mampu menghadapi problematika yang terjadi dengan lingkungannya. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Pasal 1 ayat 1 UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003).

Pendidikan menjadi institusi penting di Indonesia, karena menjadi penentu cetak biru generasi masa depan para penerus bangsa. Tanpa pendidikan akan menjadi bangsa yang tertinggal dari bangsa-bangsa lain, karena pendidikan menjadi penentu keberhasilan suatu bangsa. Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting untuk membentuk sumber daya manusia (SDM) yang handal dan mampu bersaing di dalam maupun di luar negeri. Banyak negara dengan sumber daya alam minim, namun dengan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas, mampu menjadi negara maju. Berbeda dengan Indonesia, sumber

daya alam Indonesia berlimpah ruah, namun sumber daya manusiannya lemah, sehingga masih sulit bersaing dengan negara lain. Itulah tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini.

Sebagai suatu bangsa, Indonesia memiliki cita-cita yang luhur yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 (empat): “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Cita-cita tersebut tidak akan terwujud tanpa kontribusi dari masing-masing elemen sesuai dengan perannya. Guna mewujudkan cita-cita itu perlu dilakukan dengan mempersiapkan penerus bangsa yang jujur, adil, mandiri, kreatif, bertanggung jawab, beriman, dan bertakwa. Pendidikan menjadi institusi penting untuk menyiapkan penerus bangsa dengan kualifikasi tersebut, dengan tegas dirumuskan dalam tujuan pendidikan nasional.

Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3 UU No. 20 tahun 2003).

Namun kualifikasi yang diamanatkan undang-undang tersebut belum sepenuhnya berhasil. Hal tersebut bisa diukur dari data *Education For All (EFA) Global Monitoring Report 2011: The Hidden Crisis, Armed Conflict and Education* yang dikeluarkan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) yang mengemukakan bahwa indeks pembangunan pendidikan Indonesia berdasarkan data tahun 2008 adalah 0,934. Nilai itu menempatkan Indonesia di posisi ke-69 dari 127 negara di

dunia. Artinya Indonesia masih tertinggal dari Brunei Darussalam yang berada di peringkat ke-34. Brunei Darussalam masuk kelompok pencapaian tinggi bersama Jepang, yang mencapai posisi nomor satu dunia. Adapun Malaysia berada di peringkat ke-65 atau masih dalam kategori kelompok pencapaian medium seperti halnya Indonesia (Kompas.com).

Guna mendorong percepatan peningkatan kualitas pendidikan, maka pada tahun 2013 melakukan perubahan kurikulum, yang disebut Kurikulum 2013. Sebelumnya menggunakan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) atau biasa disebut dengan Kurikulum 2006. Perubahan Kurikulum dimaksudkan merupakan penyempurnaan yang dirintis oleh pemerintah agar kekurangan dari kurikulum 2006 atau KTSP bisa disempurnakan. Dorongan utama perubahan ini adalah mempersiapkan generasi penerus bangsa yang handal dan mampu bersaing di dalam maupun di luar negeri. Disamping juga untuk menghadapi danantisipasi globalisasi, masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi informasi, konvergensi ilmu dan teknologi, ekonomi berbasis ilmu pengetahuan, kebangkitan industri kreatif dan budaya, pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknosains, mutu, investasi dan transformasi pada sektor pendidikan, serta hasil TIMSS dan PISA (Kemdikbud dalam Kunandar, 2014: 16-17).

Disamping untuk menghadapi tantangan global di atas, perubahan kurikulum dimaksud juga untuk mengantisipasi maraknya sikap atau karakter negatif generasi muda, seperti meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk, pengaruh kelompok yang kuat dalam tindak kekerasan, meningkatnya perilaku merusak diri, seperti penggunaan

narkoba, alkohol dan seks bebas, semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk, menurunnya etos kerja, semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru, rendahnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara, membudayanya ketidakjujuran, dan adanya rasa saling curiga dan kebencian di antara sesama (Lickona 2012:17). Secara lebih singkat dapat dinyatakan bahwa Kurikulum 2013 diberlakukan dengan tujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia (Kunandar, 2014: 16).

Secara internal berdasarkan kajian kurikulum, pemberlakuan kurikulum 2013, dimaksudkan untuk penyempurnaan kurikulum sebelumnya yaitu KTSP atau kurikulum 2006. Penyempurnaan dimaksud meliputi:

1. Konten kurikulum masih terlalu padat yang ditunjukkan dengan banyaknya mata pelajaran dan banyak materi yang keluasan dan tingkat kesukaran melampaui tingkat perkembangan usia anak.
2. Kurikulum belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional.
3. Kompetensi belum menggambarkan secara holistik dominan sikap, keterampilan, dan pengetahuan
4. Beberapa kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan (misalnya pendidikan karakter, kewirausahaan) belum terakomodasi secara eksplisit di dalam kurikulum
5. Kurikulum belum peka dan tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional maupun global
6. Standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci sehingga membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru, dan standar penilaian belum mengarahkan pada penilaian berbasis kompetensi (proses dan hasil) dan belum secara tegas menuntut adanya remediasi secara berkala (Kunandar, 2014: 22).

Berdasarkan kelemahan atau kekurangan dari KTSP atau kurikulum 2006, maka elemen perubahan pada Kurikulum 2013, meliputi kompetensi lulusan, kedudukan mata pelajaran yang semula diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi mata pelajaran dikembangkan dari kompetensi, pendekatan, struktur kurikulum (mata pelajaran dan alokasi waktu), proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, serta ekstrakurikuler.

Elemen di atas menyangkut semua mata pelajaran termasuk juga Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Perubahannya meliputi: materi disajikan tidak berdasarkan pengelompokan menurut empat pilar kebangsaan tetapi berdasarkan keterpaduan empat pilar dalam pembentukan karakter bangsa, materi disajikan berdasarkan kebutuhan untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab (taat norma, asas, dan aturan), adanya kompetensi yang dituntut dari siswa untuk melakukan tindakan nyata sebagai warga negara yang baik, serta Pancasila dan Kewarganegaraan bukan hanya pengetahuan tetapi ditunjukkan melalui tindakan nyata dan sikap keseharian (Kemdikbud, 2013).

KTSP merupakan kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan (Arifin, 2012:184). Kelemahan dari KTSP atau Kurikulum 2006, yaitu:

1. Isi dan pesan-pesan kurikulum masih terlalu padat, yang ditunjukkan dengan banyaknya mata pelajaran dan banyak materi yang keluasan dan kesukarannya melampaui tingkat perkembangan usia anak.
2. Kurikulum belum mengembangkan kompetensi secara utuh sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional.
3. Kompetensi yang dikembangkan lebih didominasi oleh aspek pengetahuan, belum sepenuhnya menggambarkan pribadi peserta didik (pengetahuan, keterampilan, dan sikap).
4. Berbagai kompetensi yang diperlukan sesuai dengan perkembangan masyarakat, seperti pendidikan karakter, kesadaran lingkungan,

pendekatan dan metode pembelajaran konstruktivistik, keseimbangan *soft skills and hard skills*, serta jiwa kewirausahaan, belum terakomodasi di dalam kurikulum.

5. Kurikulum belum peka dan tanggap terhadap berbagai perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun global.
6. Standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci sehingga membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam dan berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru.
7. Penilaian belum menggunakan standar penilaian berbasis kompetensi, serta belum tegas memberikan layanan remediasi dan pengayaan secara berkala (Mulyasa, 2014:60-61).

Adanya kelemahan dari KTSP atau kurikulum 2006 tersebut, pemerintah mengeluarkan Kurikulum 2013 yang berbasis pada karakter. Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, Kurikulum 2013 diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi dunia pendidikan saat ini.

Sesuai dengan KTSP yang disempurnakan oleh Kurikulum 2013, maka Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan yang bersifat alamiah (kontekstual), karena berangkat, berfokus dan bermuara pada hakekat peserta didik untuk mengembangkan berbagai kompetensi sesuai dengan potensinya masing-masing. Peserta didik dilihat sebagai subjek belajar, dan proses belajar berlangsung secara alamiah dalam bentuk kinerja dan mengalami berdasarkan kompetensi tertentu, bukan transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*). Kurikulum 2013 juga berbasis karakter dan kompetensi yang mendasari pengembangan kemampuan-kemampuan lain. Penguasaan ilmu pengetahuan, dan keahlian tertentu dalam suatu pekerjaan, kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, serta pengembangan aspek-aspek kepribadian dapat dilakukan secara optimal berdasarkan standar kompetensi tertentu. Kurikulum 2013 juga mengomodasi mata pelajaran tertentu yang pengembangannya lebih tepat menggunakan

pendekatan kompetensi, terutama yang berkaitan dengan keterampilan. Buku dan kelengkapan dokumen disiapkan lengkap sehingga memacu dan memacu guru untuk membaca dan menerapkan budaya literasi, dan membuat guru memiliki keterampilan membuat RPP, dan menerapkan pendekatan *scientific* secara benar (Mulyasa, 2014:163-164). Secara lebih kongkrit implementasi Kurikulum 2013, diantaranya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Siswa dituntut untuk aktif, kreatif dan inovatif dalam setiap pemecahan masalah yang mereka hadapi di sekolah.
2. Penilaian dilakukan pada semua aspek kompetensi yang semestinya diperoleh siswa.
3. Pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti pelaksanaannya diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran.
4. Kompetensi yang dikembangkan sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional.
5. Kompetensi menggambarkan secara *holistic* domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan.
6. Standar penilaian mengarahkan pada penilaian berbasis kompetensi seperti sikap, keterampilan, dan pengetahuan secara proporsional.
7. Mengharuskan adanya remediasi berkala (Kurniasih dan Berlin Sani, 2014:40-41)

Berdasarkan prinsip-prinsip implementasi Kurikulum 2013 di atas menegaskan bahwa guru bukan lagi pelaku utama dalam proses pembelajaran, guru di dorong berperan sebagai fasilitator, karena itu guru dituntut pula sebagai

demonstrator, pengelola kelas, mediator, dan evaluator. Untuk itu guru harus pula memiliki kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, serta kompetensi profesional. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidik tidak hanya dituntut dapat mengajar atau menguasai materi yang diajarkan saja namun harus dapat mengelola peserta didik, bersosialisasi, dan yang terpenting adalah pendidik dituntut dapat mengevaluasi peserta didik. Guru sebagai pendidik harus dapat mengevaluasi peserta didiknya sesuai kemampuan yang dimiliki anak didiknya masing-masing. Penilaian sangat penting dalam pembelajaran, karena dengan penilaian pendidik bisa mengetahui tingkat pemahaman yang dimiliki oleh peserta didik mengenai pelajaran tertentu, sehingga untuk peserta didik yang kurang bisa dibantu dan dioptimalkan lagi dengan latihan-latihan supaya bisa mencapai KKM. Penilaian merupakan proses menilai proses peserta didik dalam memahami materi tertentu dan menilai sikap-sikap peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Penilaian dilakukan dari input, proses, dan output pembelajaran. Penilaian input berarti menilai peserta didik sebelum masuk materi pembelajaran, biasanya dengan menggunakan *pre test*. Dan yang terakhir adalah penilaian output, berarti menilai keluaran peserta didik, paham atau tidak, lulus atau tidak, biasanya dengan menggunakan raport.

Sebagaimana disinggung di depan pada KTSP lebih menekankan pada ranah kognitif, untuk ranah afektif, dan psikomotorik belum dilakukan secara maksimal dan menyeluruh. Untuk Kurikulum 2013 berupaya menutupi kelemahan tersebut dengan menekankan pada penilaian autentik (*authentic assesment*). Penilaian autentik merupakan penilaian yang menilai kesiapan, proses, dan hasil belajar

siswa. Penilaian autentik menekankan untuk menilai peserta didik secara objektif pada apa yang seharusnya dinilai, baik proses maupun hasil dengan berbagai instrumen penilaian yang disesuaikan dengan tuntutan kompetensi yang ada di Standar Kompetensi (SK) atau Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) (Kunandar, 2014: 35-36).

Idealnya penilaian autentik mengacu pada Penilaian Acuan Patokan (PAP), yaitu pencapaian hasil belajar di dasarkan pada posisi skor yang diperolehnya terhadap skor ideal (maksimal). Berdasarkan hal tersebut pencapaian kompetensi peserta didik tidak dalam konteks dibandingkan dengan peserta didik lainnya, tetapi dibandingkan dengan standar atau kriteria tertentu, yakni Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Dalam penilaian autentik guru melakukan penilaian tidak hanya pada penilaian level KD, tetapi juga kompetensi inti dan SKL (Kunandar, 2014: 36).

Penilaian autentik juga menilai sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan hasil dan proses. Guru melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi atau pengamatan perilaku dengan alat lembar pengamatan atau observasi, penilaian diri, penilaian “teman sejawat” (*peer evaluation*) oleh peserta didik, jurnal, dan wawancara dengan alat panduan atau pedoman wawancara (pertanyaan-pertanyaan) langsung. Instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian antar peserta didik adalah daftar cek atau skala penilaian (*rating scale*) yang disertai rubrik, sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik dan pada wawancara berupa daftar pertanyaan (Kunandar, 2014:119). Untuk penilaian pengetahuan, dilakukan melalui tes tertulis dengan menggunakan

butir soal, tes lisan dengan bertanya langsung terhadap peserta didik menggunakan daftar pertanyaan, dan penugasan atau proyek dengan lembar kerja tertentu yang harus dikerjakan oleh peserta didik dalam kurun waktu tertentu (Kunandar, 2014:173). Sedang untuk penilaian kompetensi keterampilan dilakukan melalui penilaian berupa:

1. Kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu menggunakan tes praktik (unjuk kerja) dengan menggunakan instrumen lembar pengamatan (observasi).
2. Proyek dengan menggunakan instrumen lembar penilaian dokumen laporan proyek.
3. Penilaian portofolio dengan menggunakan instrumen lembar penilaian dokumen kumpulan portofolio dan penilaian produk dengan menggunakan instrumen lembar penilaian produk. Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian (*rating scale*) yang dilengkapi rubrik (Kunandar, 2014:263).

Penilaian autentik sebagaimana tuntutan Kurikulum 2013 tidak mudah dilakukan, salah satu penyebabnya guru sudah terbiasa hanya menilai kompetensi pengetahuan saja, aspek sikap maupun keterampilan jarang dinilai. Padahal Kurikulum 2013 menekankan ketiga aspek tersebut secara seimbang. Karena itu pelaksanaan penilaian autentik pada kurikulum 2013 kurang optimal. Fakta ini diperkuat bahwa sejumlah guru masih mengalami kebingungan dengan sistem penilaian hasil belajar siswa di kurikulum 2013 (Jakarta.com), diantaranya separuh Guru SMAN 78 Jakarta tidak paham Kurikulum 2013 (Tempo.co), ribuan guru di Surabaya tetap saja masih tidak paham mengenai penerapan Kurikulum 2013 meski sudah dilatih (Jawapos.com), sedang di Semarang, sebanyak 20 dari 23 guru SMP 21 Semarang yang mengisi angket, 87 % guru masih kesulitan dalam memahami cara penilaian kurikulum 2013 (Rohmawati, 2013). Hal ini juga diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Utari (2014), hasilnya

menunjukkan bahwa pelaksanaan penilaian autentik pada aspek afektif baru sebesar 52,8%, sedang aspek psikomotorik sebesar 48,4%, dan pada aspek kognitif dominan, yaitu sebesar 98,8%, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penilaian autentik masih kurang optimal (Utari, 2014). Berdasarkan hal tersebut masih banyak pendidik yang belum paham mengenai penilaian dalam Kurikulum 2013.

Berbagai fenomena mengenai penilaian kurikulum 2013 membuat guru atau pendidik semakin kebingungan dalam hal menilai. Guru tidak hanya disibukan dalam pembuatan rencana pembelajaran, penguasaan materi, penerapan strategi, namun guru juga disibukan dengan penilaian autentik, yang sebelumnya pada KTSP pendidik hanya menilai pengetahuan saja, dengan adanya kurikulum 2013 guru juga menilai sikap dan keterampilan peserta didik. Guru harus mencermati karakter masing-masing peserta didik saat proses pembelajaran berlangsung. Permasalahan di atas, dapat diketahui belum optimalnya penilaian autentik pada Kurikulum 2013, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Penilaian Autentik Pada Mata Pelajaran PPKn, Studi Kasus Pelaksanaan Kurikulum 2013 di SMP Negeri 2 Colomadu”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan suatu perumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penilaian autentik pada mata pelajaran PPKn di SMP Negeri 2 Colomadu ?
2. Bagaimana kendala penilaian autentik pada mata pelajaran PPKn di SMP Negeri 2 Colomadu ?
3. Bagaimana solusi dari kendala penilaian autentik pada mata pelajaran PPKn di SMP Negeri 2 Colomadu ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang akan diteliti. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan pelaksanaan penilaian autentik pada mata pelajaran PPKn di SMP Negeri 2 Colomadu.
2. Untuk mendeskripsikan kendala penilaian autentik pada mata pelajaran PPKn di SMP Negeri 2 Colomadu.
3. Untuk mendeskripsikan solusi dari kendala-kendala dalam penilaian autentik pada mata pelajaran PPKn di SMP Negeri 2 Colomadu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini berguna untuk mengembangkan konsep penilaian autentik pada mata pelajaran PPKn.
- b. Sebagai sumbangan untuk landasan kegiatan penelitian selanjutnya yang relevan.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi Siswa

Agar siswa mencapai penilaian yang objektif sesuai dengan kompetensi yang sebenarnya, baik kompetensi spiritual, kompetensi sosial, keterampilan, dan pengetahuan dalam proses pembelajaran yang diikuti.

b. Manfaat bagi Guru

Agar guru bisa menggunakan penilaian autentik dalam proses pembelajaran, sehingga kompetensi siswa dapat diukur secara lebih riil dan objektif.

c. Manfaat bagi Sekolah

- 1) Mendorong guru untuk mengimplemetasikan Kurikulum 2013 secara lebih baik khususnya mengenai penilaian.
- 2) Mendorong guru untuk melakukan penilaian secara lebih komprehensif melalui penilaian autentik sehingga kompetensi siswa lebih ternilai secara objektif.
- 3) Mendorong peningkatan kualitas sekolah melalui pelaksanaan Kurikulum 2013 secara lebih tepat.

E. Daftar Istilah

Daftar istilah merupakan suatu penjelasan istilah yang diambil dari kata-kata kunci dalam judul penelitian (Maryadi dkk, 2010:11). Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penilaian. Penilaian berarti mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik atau buruk (Sudaryono, 2012:38). Disebut pula sebagai keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh guru dan para siswanya dalam menilai diri sendiri, yang kemudian dipergunakan sebagai informasi yang dapat digunakan sebagai umpan balik untuk mengubah, membuat modifikasi kegiatan pengajaran, dan pembelajaran (Black dan William dalam Basuki dan Hariyanto, 2014:7). *Assesment* yaitu suatu proses untuk pengumpulan bukti dan mendokumentasikan pembelajaran dan pertumbuhan anak (Hill dan Ruptic, 1994 sebagaimana dikutip dalam Basuki dan Hariyanto, 2014: 8). Jadi penilaian adalah kegiatan atau proses untuk mengukur, menilai, mendokumentasikan suatu objek tertentu.
2. Penilaian Autentik. Penilaian autentik adalah kegiatan menilai peserta didik yang menekankan pada apa yang seharusnya dinilai, baik proses maupun hasil dengan berbagai instrumen penilaian yang disesuaikan dengan tuntutan kompetensi yang ada di Standar Kompetensi (SK) atau Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) (Kunandar, 2014: 35-36). Atau *assesment* autentik yang merupakan suatu penilaian yang dilakukan melalui penyajian atau penampilan oleh siswa dalam bentuk pengerjaan tugas-tugas atau berbagai aktivitas tertentu yang langsung mempunyai makna pendidikan (Hart

dikutip dalam Pantiwati, 2013: 4). *Assesment* autentik di dalamnya meliputi tentang asesmen autentik, sebenarnya juga berbicara prosedur, seperti tes formal, inventori, *checklist*, asesmen diri, portofolio, proyek dan kegiatan lainnya (Corebima dalam Pantiwati, 2013: 4) Jadi penilaian autentik adalah penilaian yang menilai sikap, keterampilan, dan pengetahuan dari input hingga output yang disajikan atau ditampilkan dalam bentuk tugas-tugas, tes formal, inventori, *checklist*, asesmen diri, portofolio, proyek dan kegiatan lainnya.

3. Kurikulum 2013, merupakan kurikulum yang lebih menekankan pada kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan (Mendikbud dalam Kurniasih dan Berlin, 2014). Kurikulum 2013 dapat dimaknai sebagai suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan (kompetensi) tugas-tugas dengan standar performansi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu (Mulyasa, 2014: 68). Berarti Kurikulum 2013 adalah konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berupa tugas-tugas dengan standar performansi tertentu.
4. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dapat dimaknai sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari peserta didik baik sebagai individu, maupun sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Darmadi, 2013). PPKn merupakan mata pelajaran yang

terdapat dalam kurikulum sekolah, untuk membina perkembangan moral anak didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila agar dapat mencapai perkembangan secara optimal dan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari (Daryono, 2011:1). Jadi PPKn merupakan mata pelajaran yang mengembangkan dan melestarikan nilai luhur sesuai dengan Pancasila dan moral yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari peserta didik baik sebagai individu, maupun sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.